

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Teori- Teori**

##### **1. Pengertian Perencanaan Pajak( *Tax Planning* )**

Suandy (2008:113) mendefinisikan perencanaan pajak (*tax planning*) sebagai “Proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajak, baik PPh maupun beban pajak yang lainnya berada pada posisi yang seminimal mungkin”. Perencanaan adalah salah satu fungsi manajemen yang penting, karena perencanaan memegang peranan yang sangat strategis dalam pembayaran pajak perusahaan dengan benar.

Mohammad Zain (2007:119) secara garis besar mendefinisikan “Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak - pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial”. Nur Hidayat (2005:35) mendefinisikan pengertian Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) dalam artikel ”*Tax Planning* Bukan Untuk Hindari Pajak tetapi Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) adalah upaya menekan jumlah kewajiban pajak secara legal”.

Dari ketiga pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak adalah upaya untuk mengatur pembayaran pajak atau meminimalkan kewajiban pajak dengan tidak melanggar perundang - undangan yang berlaku, agar pajak yang dibayarkan tidak lebih dari jumlah yang seharusnya. Tujuan dari

perencanaan pajak adalah untuk membuat agar beban pajak yang harus dibayar dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan perpajakan yang ada, akan tetapi menurut pembuat Undang - undang perencanaan disini sama dengan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), karena secara hakikat ekonomis kedua-duanya adalah untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak, karena pajak merupakan unsur pengurang laba.

Terdapat beberapa jenis perencanaan pajak spesifik yang dilaksanakan pada sebuah perusahaan, yaitu sebagai berikut:

- a. Perencanaan dokumentasi dan pelaporan untuk pajak. Meliputi dokumen yang lengkap dan pelaporan yang jelas dan akurat yang mendukung laporan SPT (Surat Pemberitahuan) perusahaan.
- b. Perencanaan tenaga professional akuntansi dan perpajakan. Disarankan untuk menggunakan karyawan yang mengerti pembukuan dan perpajakan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan rumus perencanaan pajak untuk menganalisis suatu ukuran dari efektivitas manajemen pajak pada laporan keuangan perusahaan tahun berjalan.

$$TRR = \frac{Net\ Income_{it}}{Pre\ Tax\ Income\ EBIT_{it}}$$

Keterangan :

- TRR<sub>it</sub> = Tax Retention Rate (tingkat retensi pajak)perusahaani pada tahun t.
- Net Income<sub>it</sub> = Laba bersih perusahaan i pada tahun t.
- Pretax Income (EBIT<sub>it</sub>) = Laba sebelum pajak perusahaan i tahun t.

## **2. Langkah – Langkah dalam Perencanaan Pajak**

Dalam rangka melakukan perencanaan pajak, maka Wajib Pajak harus memperhatikan langkah-langkah berikut untuk menyusun perencanaan pajak bagi perusahaannya yaitu sebagai berikut :

- a. Memahami dan menerapkan peraturan dan perundang-undangan perpajakan. Jenis-jenis peraturan perpajakan adalah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Dirjen Pajak, Peraturan Dirjen Pajak, dan Surat Edaran Dirjen Pajak. Dengan mengetahui peraturan dan perundang-undangan perpajakan maka Wajib Pajak dapat mengoptimalkan fasilitas perpajakan yang ada.
- b. Menentukan hasil (outcome) dari melakukan perencanaan pajak, seperti berikut:
  - 1) Wajib Pajak melakukan efisiensi pembayaran pajak yang masih dalam ruang lingkup peraturan dan perundang-undangan perpajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan dan perundang-undangan perpajakan.
  - 2) Wajib Pajak menerapkan seluruh peraturan dan perundang-undangan perpajakan, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi-sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana.
  - 3) Wajib Pajak dalam membayar gaji karyawan atau pengguna jasa tenaga ahli (dokter, konsultan atau pengacara), maka harus

melakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 15.

- 4) Menyusun laporan keuangan yang di lengkapi dengan buku besar, laporan pendukung laporan keuangan ataupun rekonsiliasi dan ekualisasi yang dapat memperjelas transaksi keuangan perusahaan.
- 5) Pembayaran pajak yang terutang dengan tepat waktu untuk menghindari adanya sanksi keterlambatan dari kantor pajak.
- 6) Penyampaian Surat Pemberitahuan ke Kantor Pajak tepat waktu sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

### **3. Upaya Wajib Pajak Meminimalkan Beban Pajak**

Mengingat betapa pentingnya peran masyarakat membayar pajak untuk turut serta dalam menanggung pembiayaan negara, maka dituntut kesadaran sebagai warga negara untuk memenuhi kewajiban kenegaraan. Terlepas dari kesadaran sebagai warga negara, pada sebagian besar masyarakat tidak memenuhi kewajiban membayar pajak. Dalam hal ini timbul perlawanan terhadap pajak yaitu:

#### **a. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)**

Penghindaran pajak adalah Wajib Pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang sekalipun kadang-kadang dengan jelas menafsirkan undang-undang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan

pembuat undang-undang. Penghindaran pajak dilakukan dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut :

1) Menahan Diri

Menahan diri yaitu Wajib Pajak tidak melakukan sesuatu yang biasa di kenai pajak.

2) Lokasi Terpencil

Memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah.

b. Pengelakan Pajak (*Tax Evasion*)

Hal ini merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak / mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian dari penghasilannya.

c. Melalaikan Pajak

Wajib Pajak melalaikan semua peraturan dan perundang-undangan perpajakan, misalnya Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sekalipun mereka telah memiliki penghasilan, sehingga pihak fiskus akan menerapkan aturan-aturan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada.

#### **4. Pengertian Manajemen Laba**

Labanya adalah salah satu informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan dan sangat penting bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan.

Walaupun laba bukan satu-satunya informasi yang tersedia, akan tetapi laba sering menjadi fokus utama pemakai laporan keuangan sebagai dasar pembuatan keputusan. Menurut Davidson, Stickney dan weil dalam Sulistyanto (2008:205), “Manajemen laba proses untuk mengambil langkah tertentu yang disengaja dalam batas-batas prinsip akuntansi yang diterima umum untuk menghasilkan tingkat yang diinginkan dari laba yang dilaporkan”.

Scott (2006: 344) dalam Rachmawati dkk membagi cara pemahaman atas manajemen laba menjadi dua Pertama, “melihatnya sebagai perilaku oportunistis manajer untuk memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak utang, dan *political costs* (*oportunistic Earnings Management*). Kedua, dengan memandang manajemen laba dari perspektif *efficient contracting* (*Efficient Earnings Management*), dimana manajemen laba memberi manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak”. Dengan demikian, manajer dapat mempengaruhi nilai pasar saham perusahaannya melalui manajemen laba, misalnya dengan membuat perataan laba (*income smoothing*) dan pertumbuhan laba sepanjang waktu.

Menurut Belkaoui (2007:201–202), “manajemen laba adalah potensi penggunaan manajemen akrual dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi”. Walaupun terdapat beberapa definisi tentang manajemen laba, definisi tersebut memiliki kesamaan yang menghubungkan definisi yang satu dengan yang lainnya. Dari beberapa kesamaan itu dapat terlihat bahwa manajemen laba merupakan

aktivitas manajerial untuk mempengaruhi laporan keuangan baik dengan cara memanipulasi data atau informasi keuangan perusahaan maupun dengan cara pemilihan metode akuntansi yang diterima dalam prinsip akuntansi berterima umum, yang pada akhirnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan perusahaan. “Pemilihan metode akuntansi yang secara sengaja dipilih oleh manajemen untuk tujuan tertentu dikenal dengan sebutan manajemen laba atau *earning management* (Halim dkk,2005:109)”. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perilaku manajemen laba untuk mengukur besarnya pendekatan distribusi laba.

$$\Delta E = \frac{E_{it} - E_{it-1}}{MVE_{t-1}}$$

Keterangan:

$\Delta E$  = distribusi laba, di mana bila nilai  $\Delta E$  adalah nol atau positif, maka perusahaan menghindari penurunan laba. Bila nilai  $\Delta E$  adalah negatif, maka perusahaan menghindari pelaporan kerugian.

$E_i$  = laba perusahaan i pada tahun t.

$E_{it-1}$  = laba perusahaan i pada tahun t-1.

$MVE_{t-1}$  = Market Value of Equity perusahaan i pada tahun t-1.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tingkat kapitalisasi sebagai proksi market value of equity. Nilai kapitalisasi tersebut diukur dengan mengalikan jumlah saham beredar perusahaan i pada akhir tahun t-1 dengan harga saham perusahaan i pada akhir tahun t-1.

## 5. Teknik Manajemen Laba

Motivasi dan peluang yang dimiliki oleh manajer, membuat manajer melakukan praktik manajemen laba pada laporan keuangan perusahaan. Namun dalam melakukan praktik manajemen laba, manajer harus melakukannya dengan cermat agar tidak mudah diketahui oleh pihak lain. Philips (2007:230 – 233) dalam subagyo menyatakan bahwa “ada 3(tiga) teknik manajemen laba yang dapat dilakukan oleh manajemen”, antara lain:

### a. Memanfaatkan Peluang Untuk Membuat Estimasi Akuntansi

Cara manajemen laba untuk mempengaruhi laba melalui judgement terhadap estimasi akuntansi antara lain estimasi tingkat piutang tak tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi aktiva tak berwujud, estimasi biaya garansi, dan lain-lain.

### b. Mengubah Metode Akuntansi

Manajemen memiliki kesempatan untuk merubah metode akuntansi perusahaan yang sesuai dengan kondisi perusahaan pada periode tersebut. Perubahan dalam metode akuntansi harus diungkapkan dengan jelas beserta alasannya yang rasional dalam catatan pelaporan keuangan. Contoh: merubah depresiasi aktiva tetap dari metode depresiasi angka tahun ke metode depresiasi garis lurus.

### c. Menggeser Periode Biaya atau Pendapatan

Di dalam SAK mengharuskan perusahaan menggunakan dasar akrual dalam pencatatan laporan keuangan (kecuali laporan arus kas), sehingga memberikan kesempatan bagi manajemen untuk memanipulasi laporan



keuangan perusahaan. Contohnya adalah mempercepat atau menunda pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan sampai periode akuntansi berikutnya mempercepat atau menunda pengeluaran promosi sampai periode berikutnya.

## **6. Hubungan Perencanaan Pajak Terhadap Praktik Manajemen Laba**

Mohammad Zein (2007:255) dalam bukunya Perencanaan pajak merupakan “tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya”. Tujuannya adalah bagaimana pengeluaran tersebut dapat meminimalkan jumlah pajak yang dibayarkan kepada pemerintah melalui apa yang disebut dengan penghindaran pajak dan bukan penyeludupan pajak yang merupakan tindakan pidana yang tidak dapat ditolerir.

Manajemen laba oleh Schroeder (2009:315) didefinisikan sebagai “percobaan oleh manajemen perusahaan untuk mempengaruhi laba jangka pendek yang dilaporkan”. Healy, Paul, dan Wahlen dalam Schroeder (2009:315) menemukan bahwa “manajemen laba terjadi karena bermacam-macam alasan, termasuk untuk mempengaruhi pasar saham, meningkatkan kompensasi manajemen, mengurangi kemungkinan pelanggaran persetujuan peminjaman, dan untuk menghindari intervensi dari peraturan pemerintah manajemen laba dilakukan agar dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham terhadap manajer”.

Philips, Pincus, Rego (2003:205) menganalisis penggunaan beban pajak tangguhan dalam mengidentifikasi manajemen laba yang dilakukan untuk

mencapai 3 (tiga) tujuan pelaporan laba, yaitu “menghindari kerugian, menghindari penurunan laba, dan menghindari kegagalan memenuhi prediksi laba oleh analisis”. Mereka juga membandingkannya dengan 3 (tiga) model akrual. Hasil penelitiannya menemukan bahwa baik beban pajak tangguhan dan akrual secara signifikan dapat mendeteksi perilaku manajemen laba yang dilakukan perusahaan untuk mencapai 2 tujuan pelaporan, yaitu menghindari penurunan laba dan menghindari kerugian. Sementara untuk menghindari kegagalan memenuhi prediksi laba oleh analisis, beban pajak tangguhan tidak signifikan secara statistik. Dalam hal ini, Philips, Pincus, Rego(2003:205) menemukan bahwa beban pajak tangguhan dapat memberikan penjelasan tambahan kepada akrual dalam mendeteksi manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan.

Yulianti (2005:198) dan Philips, Pincus, Rego (2003:205) menggunakan beban pajak tangguhan (*deferred tax expense*) dan akrual untuk mendeteksi manajemen laba. Penelitian-penelitian ini menemukan bahwa “perusahaan yang termasuk dalam kategori *small profit firm* memiliki rata-rata beban pajak tangguhan lebih tinggi daripada *small loss firm*”. Yulianti (2005:198) dan Philips, Pincus dan Rego (2003:205) menduga perusahaan yang tergolong *small profit firm* melakukan manajemen laba dengan tujuan melewati batas pelaporan laba agar tidak melaporkan angka rugi. Hasil penelitian mereka menemukan bahwa memang terjadi manajemen laba dengan tujuan menghindari pelaporan kerugian pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Namun penelitian ini tidak menemukan adanya manajemen laba dengan tujuan menghindari pelaporan penurunan laba. Jadi, untuk menghindari praktik

manajemen laba dibutuhkan perencanaan pajak sebagai alat untuk penghindaran pajak bukan penyeludupan pajak.

## B. Penelitian Terdahulu

Konsep dasar penelitian ini mengacu pada fenomena perubahan tarif pajak, namun penelitian lebih fokus pada tindakan perusahaan setelah terjadinya perubahan (penurunan) tarif pajak. Oleh karena penelitian ini masih mengarah pada konsep perubahan tarif pajak, maka beberapa penelitian mengenai praktik manajemen laba yang dimotivasi adanya perubahan tarif pajak menjadi acuan dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu yang menjadi referensi bagi penulis adalah:

**Tabel 3.1**  
**Penelitian terdahulu**

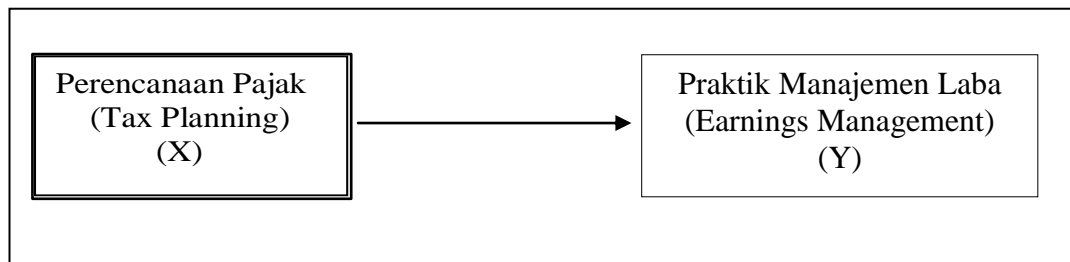
<b>Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Variabel yang Digunakan</b>	<b>Hasil penelitian</b>
Dewa Ketut Wira Santana (2015)	Pengaruh Perencanaan Pajak, Kepemilikan Manajerial dan Ukuran Perusahaan Terhadap Praktek Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia.	Manajemen Laba, Perencanaan Pajak, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan.	Berdasarkan analisis dan pengujian hipotesis, maka didapat kesimpulan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif sedangkan kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap praktek manajemen laba.
Christina R.Sumomba (2010)	Pengaruh bebanpajak tangguhandan	Agency theory, manajemen	Beban pajak tangguhan tahun 2008 berpengaruh secara positif signifikan terhadap praktik

	perencanaan pajak terhadap praktik manajemen laba.	laba, beban pajak tangguhan, perencanaan pajak, tarif pajak progresif, tarif pajak tunggal.	manajemen laba tahun 2008, Perencanaan pajak tahun 2008 berpengaruh secara positif signifikan terhadap manajemen laba tahun 2008, Beban pajak tangguhan tahun 2009 tidak berpengaruh secara positif signifikan terhadap praktik manajemen laba tahun 2008.
Ferry Aditama (2013)	Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Nonmanufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Manajemen laba, earning threshold, perencanaan pajak, taxation.	Berdasarkan hasil analisa data, terlihat bahwa perencanaan pajak ternyata tidak berpengaruh positif terhadap manajemen laba pada perusahaan nonmanufaktur yang terdaftar di BEI. Akan tetapi, hasil pada analisis deskriptif menunjukkan bahwa 77 perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini melakukan perencanaan pajak dengan cara menghindari penurunan laba.

### C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan unsur pokok penelitian guna persamaan persepsi tentang bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor – faktor yang penting yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

Berdasarkan rumusan masalah, landasan teori, dan penelitian sebelumnya maka dapat dibentuk kerangka konseptual dalam penelitian ini, yaitu pada gambar 2.1 di bawah ini :



**Gambar II.1**  
**Kerangka Konseptual**

Pada gambar 2.1 di atas menunjukkan variabel terikat yaitu praktik manajemen laba (Y) dipengaruhi oleh variabel bebas perencanaan pajak (X) yaitu variabel yang diukur dengan menggunakan rumus tax retention rate (tingkat retensi pajak), yang menganalisis suatu ukuran dari efektivitas manajemen pajak pada laporan keuangan tahun berjalan. Kemudian variabel terikat yaitu praktik manajemen laba menggambarkan kemampuan manajer dalam mempengaruhi pelaporan keuangan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Selanjutnya variabel-variabel tersebut disusun kedalam bentuk persamaan regresi linear sederhana dan dilakukan pengujian asumsi klasik.

#### **D. Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah, dan kajian empiris yang dilakukan sebelumnya, maka hipotesis penelitian ini adalah perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba.